

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BUDAYA LOKAL DALAM TATA KELOLA KEUANGAN PADA LPD DESA ADAT SAMUAN

Novita Grace¹ ; Ni Putu Erviani Astari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Pariwisata Pendidikan dan Humaniora,
Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia.
Email: 20111501026@undhirabali.ac.id

ABSTRAK/ ABSTRACT

Laporan ini membahas tentang Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Keuangan pada LPD Desa Adat Samuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance dan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Keuangan pada LPD Desa Adat Samuan. Metoda penelitian yang digunakan ialah wawancara serta dokumentasi pada LPD Desa Adat Samuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan LPD Desa Adat Samuan tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada aspek rincian tugas dan tanggung jawab, masih adanya rangkap jabatan dari pengurus LPD. Dalam pengelolaan keuangan di LPD, prinsip kehati-hatian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. LPD Desa Adat Samuan dalam mengelola keuangannya sudah menerapkan budaya lokal "Tri Kaya Parisudha" dibuktikan dari seluruh karyawan LPD Desa Adat Samuan menerapkan budaya Tri Kaya Parisudha, dengan sungguh-sungguh. Hal ini dilihat dari ketiga variabel Manacika (Pikiran), Wacika (Perkataan) dan Kayika (Perbuatan) yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus dan karyawan di LPD Desa Adat Samuan.

Kata kunci: *Good Corporate Governance, Budaya Lokal, Tata Kelola Keuangan, Lembaga Keuangan, LPD*

1. Pendahuluan

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate berarti perusahaan dan governance artinya pengaturan. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza (2014:58) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Corporate governance merupakan konsep yang

diajukan demi peningkatan kinerja organisasi melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan. Konsep corporate governance demi tercapainya pengelolaan organisasi yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan organisasi yang makin baik nantinya menguntungkan banyak pihak. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance diartikan sebagai tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

Budaya lokal untuk melestarikan adat dan tradisi serta menjaga stabilitas budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran Hindu yang dikenal dengan Tri Hita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan dalam dimensi yang harmonis. Akibatnya, kehidupan masyarakat hukum adat di Desa Adat Samuan selalu berorientasi pada dunia nyata (skala) dan dunia spiritual-magis-religius (niskala), yang tercermin dalam bentuk hukum adat tertulis (awig-awig) sebagai dasar pendirian LPD di Bali. Selain penerapan praktik tata kelola yang baik, salah satu upaya untuk meningkatkan integritas sumber daya manusia untuk menghindari adanya kecurangan dan mencapai tata kelola keuangan yang sehat, yaitu dengan mengaplikasikan budaya lokal (Saputra et al., 2018). Keinginan untuk melakukan kecurangan muncul ketika kesempatan, kekuasaan, dan pengawasan yang kurang. Budaya Tri Kaya Parisudha adalah budaya lokal yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penegasan Suhardana (2007) bahwa Tri Kaya Parisudha adalah ajaran agama Hindu yang terdiri dari tiga proses yang diperlukan pemurnian perilaku manusia. Berdasarkan konsep Tri Kaya Parisudha, dimaksudkan agar setiap karyawan dapat melakukan pengendalian diri dan percaya akan adanya Hukum/Karma yang akan dihasilkan dari setiap tindakan.

2. Metode

Lokasi penelitian diadakan di LPD Desa Adat Samuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data berupa data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Adapun narasumber yang di wawancarai ialah para staf LPD Desa Adat Samuan. Selain itu, data sekunder berupa laporan keuangan dan data-data lainnya yang berkaitan dengan juga digunakan dalam penelitian itu.

3. Hasil dan Pembahasan

Tata Kelola Perusahaan yang baik meningkatkan kepercayaan klien kepada LPD (Saputra dan Kurniawan, 2017). Penerapan tata Kelola Perusahaan yang efektif akan menghindari pengambilan keputusan yang salah dan kegiatan yang mementingkan diri sendiri, sehingga meningkatkan nilai dan kinerja keuangan LPD. Prinsip – prinsip good corporate governance yang ditetapkan di LPD Desa Adat Samuan yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Transparansi

Penerapan GCG ditinjau dari transparansi terdiri dari: menyediakan informasi secara tepat waktu dan akurat, visi, misi dan strategi usaha serta keterbukaan informasi (KNKG dalam Hamdani 2016:73)

1. Menyediakan informasi secara tepat waktu dan akurat

Menurut Ketua LPD Desa Adat Samuan (diwawancarai tgl 3 November 2023) setiap akhir tahun diadakan RAT (Rapat Akhir Tahun) yang dimana dihadiri oleh seluruh kepala keluarga desa adat samuan. Dimana informasi yang diberikan pada saat rapat akhir tahun berupa laporan keuangan. Informasi keuangan LPD diutarakan pada saat sangkep atau rapat bersama seluruh warga desa adat samuan, selain itu diadakan rapat bersama sabha desa dan klian desa. Hal ini menandakan bahwa LPD Desa Adat Samuan menyediakan informasi secara tepat waktu dan akurat

2. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi dalam sebuah lembaga seperti LPD, sangat diperlukan karena akan mempengaruhi kepercayaan dari nasabah maupun calon nasabah yang akan melakukan transaksi di LPD. Namun lain halnya yang terjadi di LPD Desa Adat Samuan, menurut informasi Ketua LPD, bunga dan deposito awal tahun berdiri LPD Desa Adat Samuan.

Menurut Ketua LPD Desa Adat Samuan bunga awal 1,6 % digunakan agar mengundang para nasabah untuk menabung di LPD Desa Adat Samuan. Namun seiring berjalannya waktu bunga tersebut menurun dan pada saat diwawancarai (30 Agustus 2023) para pegawai pun tidak mengetahui alasan pasti mengapa bunga menurun. Hal ini membuktikan bahwa Ketua LPD tidak memberikan informasi yang terbuka terhadap pengurus LPD yang lain maupun kepada nasabah dalam hal administrasi

Akuntabilitas

Penerapan GCG ditinjau dari akuntabilitas terdiri dari: rincian tugas dan tanggung jawab, karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sistem pengendalian internal yang efektif dan memiliki ukuran kinerja seperti penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) dan etika bisnis (Hamdani. 2016:74).

1. Rincian tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab dari pengurus LPD Desa Adat Samuan adalah ketua bertugas menjalankan operasional LPD, TU/sekretaris menangani masalah administrasi, bendahara sebagai pemegang dana dan pembuatan laporan keuangan dan kolektor sebagai pemungut dana. (diwawancarai tgl, 2 November 2023). Namun hal ini tidak terjadi di LPD Desa Adat Samuan. Ketua melakukan rangkap jabatan yakni melakukan tugas dan tanggung jawab baik menjadi bendahara, sekretaris/TU. Kondisi ini menyebabkan pegawai LPD Desa Adat Samuan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan tugas dan tanggung jawab setiap pengurus LPD tidak dijalankan sesuai dengan SOP. Dibuktikan dengan adanya rangkap jabatan dimana sekretaris merangkap sebagai kolektor,

ketua merangkap dan mengambil alih dalam hal pelaporan. Dalam kegiatan operasional LPD penting untuk ditingkatkan ajaran trikaya parisudha guna mewujudkan perbuatan yang baik sehingga mendapat hasil pekerjaan yang bermutu.

2. Karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

LPD Desa Adat Samuan memiliki enam karyawan yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris/TU, dan tiga petugas lapangan. Namun yang mengetahui cara mengoperasikan komputer hanya ketua, sekretaris/ TU, dan 1 petugas lapangan. Sekretaris/ TU memiliki tanggung jawab dalam mencatat semua transaksi, jurnal, neraca saldo, namun hal ini dikerjakan oleh 1 petugas lapangan dikarenakan minimnya kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer. Pencatatan kas pada LPD Desa Adat Samuan sehari-harinya dilakukan dengan menggunakan cara manual oleh bendahara sehingga sering terjadinya kas yang tidak balance. Hal ini menunjukkan karyawan tidak mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komputerisasi yang ada sangat terbatas, hal ini menandakan budaya lokal trikaya parisudha tidak dijadikan pedoman dalam tata kelola keuangan di LPD sehingga mengakibatkan SDM yang ada tidak berfungsi secara efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Responsibilitas

Penerapan GCG ditinjau dari responsibilitas terdiri dari: tanggung jawab sosial, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan (Hamdani. 2016:75)

1. Kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan anggaran dasar dan peraturan Perusahaan

Prinsip kehati-hatian kurang diterapkan di LPD Desa Adat Samuan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya salah dalam pencatatan buku kas dikarenakan pembuatan yang masih manual terkhususnya dalam memasukan kas dan juga pendebitan yang dilakukan oleh bendahara sehingga kadang membuat neraca terdapat hasil yang tidak balance. Hal ini berarti prinsip kehati-hatian dalam pembuatan kas pada buku kas tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Seharusnya setiap pencatatan yang dibuat oleh bendahara harus diperiksa kembali. Dalam tata kelola keuangan di LPD, ketua melupakan salah satu ajaran agar selalu berpikir, berkata, maupun berbuat secara benar dan baik sesuai dengan kebudayaan yang dianut oleh umat Hindu dalam ajaran yang disebut trikaya parisudha dimana ajaran ini didasari atas hukum/karma yang akan didapat sesuai dengan perbuatan seseorang

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial

Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan antara lain, pemberian dana punia di pura desa, dana partisipasi pemuda setiap pengerupukan (rangkaiannya hari raya Nyepi), dana partisipasi dari laba LPD untuk banjar setiap tahun. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah dijalankan sebagaimana mestinya hal ini dijadikan pedoman bagi pengurus LPD dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat desa setempat.

Independensi

Penerapan GCG ditinjau dari independensi terdiri dari menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (Hamdani. 2016:74).

1. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun

LPD Desa Adat Samuan dalam strukturnya tidak ada yang mendominasi baik itu dominasi bendesa maupun pengawas internal. Dominasi justru terjadi dalam aktivitas operasional LPD Desa Adat Samuan, dimana Ketua selalu mendominasi kegiatan LPD. Hampir seluruh kegiatan transaksi keuangan didominasi oleh Ketua LPD Desa Adat Samuan.

2. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan

LPD Desa Adat Samuan terdapat struktur organisasi, tetapi fungsi dan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. SOP yang ada tidak berjalan sesuai dengan jabatan masing-masing. Adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh ketua yang mengambil tugas bendahara, selain itu petugas lapangan bertugas juga dalam mencatat neraca saldo, catatan transaksi yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris/TU. Hal ini berarti fungsi dan tugas tidak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan SOP tidak dijalankan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pengurus. Hal ini mencerminkan ajaran trikaya parisudha tidak diterapkan dalam kegiatan operasional di LPD, yaitu berkaitan dengan sikap dan perilaku (*kayika*). Seharusnya LPD mewujudkan adanya pembagian tugas secara jelas dan dalam upaya menghindari potensi konflik kepentingan.

Kewajaran dan Kesetaraan

Penerapan GCG ditinjau dari kewajaran dan kesetaraan terdiri dari memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dan mengkomunikasikan gagasan, serta memperlakukan pemangku kepentingan secara adil (Hamdani. 2016:74).

1. Memberikan Kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat

Gagasan keadilan dan kesetaraan memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk memperlakukan pemangku kepentingannya secara adil dan memenuhi hak-haknya. Ruang dalam menyampaikan kritik dan saran dari masyarakat sudah dijalankan melalui paruman dan pembagian hasil SHU sudah ada panduannya. Hal ini berarti kewajaran seperti memberikan pelaporan dan pembagian hasil SHU sudah berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini ajaran trikaya parisudha sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip kebenaran, yaitu perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam penyampaian kritik dan saran maupun dalam hal pembagian SHU kepada desa adat.

Berdasarkan penjelasan seluruh variabel good corporate governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran; implementasi. Namun, terkait budaya lokal, LPD Desa Adat Samuan telah menerapkannya ajaran trikaya parisudha sebagai pedoman atau landasan dalam

kegiatan operasional tata kelola keuangan di LPD. Ajaran trikaya parisudha penting diterapkan untuk meningkatkan pendidikan moral sehingga tercipta kualitas sumber daya manusia yang tercerminin melalui kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku yang tidak merugikan. Adapun pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Samuan berdasarkan trikaya parisudha sebagai berikut.

Manacika (Pikiran)

Penerapan budaya Tri Kaya Parisudha dalam tata Kelola keuangan di LPD Desa Adat Samuan ditinjau dari manacika (pikiran) yang terdiri dari pikiran baik, pikiran benar, pikiran bersih dan pikiran suci (Atmaja, 2010:45). Pelaksanaan budaya Tri Kaya Parisudha ditinjau dari segi manacika (pikiran) di LPD Desa Adat Samuan sudah diterapkan sejak lama. Tetapi tidak dapat diketahui isi pikiran atau hati karyawan LPD karena setiap orang mempunyai pikiran berbeda. Namun, ketika melakukan pelayanan kepada nasabah LPD, seluruh karyawan bekerja dengan baik. Seluruh pengurus dan karyawan sudah bekerja dengan pikiran yang baik agar hasil pekerjaan bermutu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan terkait Tri Kaya Parisudha khususnya manacika (pikiran) sebelum aktivitas kerja adalah kegiatan mebanten di Mrajan LPD Desa Adat Samuan. Kegiatan ini dimaksudkan agar karyawan memiliki pikiran baik, benar, bersih dan suci.

Wacika (Perbuatan)

Penerapan budaya Tri Kaya Parisudha dalam tata Kelola keuangan di LPD Desa Adat Samuan ditinjau dari Wacika (perkataan) yang terdiri dari berbahasa yang halus, sopan dan ramah (Atmaja, 2010:45). Pelaksanaan budaya Tri Kaya Parisudha ditinjau dari segi wacika (perkataan) di LPD Desa Adat Samuan sudah diterapkan sejak lama. Seluruh pengurus dan karyawan sudah bekerja dengan menggunakan bahasa yang halus, sopan dan ramah. Hal tersebut terlihat saat karyawan melayani nasabah, selalu menggunakan tutur bahasa yang halus kepada para nasabah yang bertransaksi.

Kayika (Perbuatan)

Penerapan budaya Tri Kaya Parisudha dalam tata kelola keuangan di LPD Desa Adat Samuan ditinjau dari ayika (Perbuatan) yang terdiri dari sikap dan perilaku (Atmaja, 2010:45). Pelaksanaan budaya Tri Kaya Parisudha ditinjau dari segi kayika (perbuatan) di LPD Desa Adat Samuan sudah diterapkan sejak lama. Hal tersebut terlihat saat karyawan membantu nasabah menyetor tabungan ataupun pada saat memungut setoran kredit di rumah-rumah nasabah serta bersikap profesional pada saat dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat sekitar terkait dengan transaksi keuangan di LPD Desa Adat Samuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, seluruh karyawan LPD Desa Adat Samuan menerapkan budaya Tri Kaya Parisudha, dengan sungguh – sungguh. Hal ini dilihat dari ketiga variabel Manacika (Pikiran), Wacika (Perkataan) dan Kayika (Perbuatan) semuanya dilaksanakan dengan baik oleh pengurus dan karyawan di LPD Desa Adat Samuan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan LPD Desa Adat Samuan tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran yang sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek rincian tugas dan tanggung jawab, masih adanya rangkap jabatan dari pengurus LPD. Dalam pengelolaan keuangan di LPD, prinsip kehati-hatian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. bahwa

LPD Desa Adat Samuan dalam mengelola keuangannya sudah menerapkan budaya lokal "Tri Kaya Parisudha" dibuktikan dari seluruh karyawan LPD Desa Adat Samuan menerapkan budaya Tri Kaya Parisudha, dengan sungguh-sungguh. Hal ini dilihat dari ketiga variabel Manacika (Pikiran), Wacika (Perkataan) dan Kayika (Perbuatan) yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus dan karyawan di LPD Desa Adat Samuan.

5. Daftar Rujukan

- Arifin, A. H. (2023). Moderasi Good Corporate Governance pada Pengaruh Capital terhadap Kinerja Keuangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*.
- Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
- Budiasih, I. N., & Lastrini, M. Y. (2023). Budaya Tri Hita Karana Memoderasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi*.
- Karyada, I. F., & Kusuma Sari, P. S. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Budaya Lokal dalam Tata Kelola Keuangan LPD. *Hita Akuntansi dan Keuangan*.
- Samtika Putra, I. D., & Supartini, N. W. (2022). Pengaruh Sosial Responsibility, Corporate Governance dan Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Keuangan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*.

